

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DENGAN
PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK DI KECAMATAN GAYAMSARI**

Oleh:

Anindya Rachmania, Ari Subowo, Dewi Rostyaningsih

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

ABSTRACT

Semarang Local Government accelerate the realization of the development of Child Friendly City/Regency by creating mayor regulations number 20 year 2010 concerning child friendly policy using child friendly village approach, afterward follow up with the Regional Action Plan and Semarang mayor's decision number 050/425 concern in determining the location of District Pilot Program in Semarang City in 2011-2015. Gayamsari Sub-district is chosen as the pilot of child friendly sub-district hereafter implement derivatives regulation that is child-friendly village, held in Gayamsari Sub-district. Even though has already set as the pilot child friendly village, however Gayamsari District still has low numbers of APK APM and low numbers of child welfare compared with other pilot districts. The research goal is to find out how to the program implementation of Child Friendly using Child Friendly Village Approach undertaken by Gayamsari Village using success indicator from RAD and PERWAL, also supporting factors and resistor factors of program implementation. This research uses the theory of George C. Edward III. The methods of this research uses qualitative research in descriptive type.

The result of this research, the clusters of civil rights and freedoms, family environment and the right clusters alternative, clusters of education and utilization of leisure and arts activities, not in accordance with the indicators of success, Whereas the right cluster of basic health and welfare, and special protection cluster implementation is in conformity with the indicators of success. Driving factor of this implementation is a bureaucratic structure and disposition of the cadres, while the inhibiting factor of resources, communication, and the disposition of the employees of district and village

The conclusion of this research program implementation KLA using Child Friendly Village approach in Gayamsari Village has not succeed yet. Because there are still several success indications has not fulfilled yet. Therefore, there are the factors which inhibits program implementation. It needs to be improved in manufacturing RAD, the communication between Semarang Government, Sub-district, Village, also the improvement in financial resources and disposition employees in village and sub-district.

Keywords: Implementation, Program City of Eligible Children, the Child Friendly Village

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat panduan teknis mengenai Kota/Kabupaten Layak Anak melalui program pemenuhan hak anak pada 5 kluster yaitu, kluster hak sipil dan kemerdekaan, kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni, dan kluster perlindungan khusus. Pemerintah Kota Semarang mempercepat terwujudnya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan membuat peraturan walikota Semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Rencana Aksi Daerah dan keputusan Walikota Semarang nomor 050/425 tentang Penetapan Lokasi Program Kecamatan Percontohan Layak Anak di Kota Semarang Tahun 2011-2015. Kecamatan Gayamsari dipilih

sebagai percontohan Kecamatan ramah anak yang kemudian melaksanakan peraturan turunannya yaitu kelurahan ramah anak, dilaksanakan di kelurahan Gayamsari. Walaupun telah ditetapkan sebagai percontohan Kecamatan ramah anak, akan tetapi Kecamatan Gayamsari masih memiliki angka APK APM rendah dan angka kesejahteraan anak yang rendah dibanding dengan kecamatan percontohan lainnya.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Gayamsari?
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak di Kelurahan Gayamsari?

C. TEORI

C.1 IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Kluster Hak Sipil dan Kemerdekaan
2. Kluster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kluster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Kluster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni
5. Kluster Hak Perlindungan Khusus

C.2 Teori George C. Edwards III

Dalam implementasi kebijakan menurut Edwards, dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Desain Penelitian kualitatif deskriptif, Situs Penelitian di Kantor Kelurahan

Gayamsari Jl. Slamaet Riyadi no. 04, Subjek Penelitian si penulis sendiri dengan dibantu 4 narasumber, Jenis Data berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis dan foto, Sumber Data primer di dapat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung sedangkan Data sekunder di dapat dari dokumen dan arsip-arsip yang dimiliki Kelurahan gayamsari, Teknik Pengumpulan Data menggunakan Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, Teknik Analisa Data menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian ditarik kesimpulan, dan untuk menguji Kualitas Data menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Kluster Hak Sipil dan Kemerdekaan

Melalui perwal indikator kelurahan ramah anak yang terdiri atas adanya keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, ada dan berfungsinya forum/ kelompok/ paguyuban anak di kelurahan, ada data/profil anak di kelurahan, setiap

anak punya akta kelahiran, adanya peraturan kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak.

Dalam RAD Kota Semarang fokus pelaksanaan program mengenai, kepemilikan akte kelahiran dan meningkatkan ketersediaan fasilitas informasi dan fasilitas informasi berbasis teknologi, seni dan budaya. Pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan indikator penilaian kelurahan ramah anak, tentang kesadaran para orang tua untuk membuat anaknya akte kelahiran telah baik dan pada indikator kedua dalam RAD yaitu meningkatkan ketersediaan fasilitas informasi dan fasilitas informasi berbasis teknologi, seni dan budaya, hal tersebut penulis temukan dengan adanya perpustakaan yang sedang berjalan berubah menjadi taman bacaan masyarakat dan tersedianya komputer untuk masyarakat, tetapi untuk indikator fasilitas informasi berbasis teknologi belum tertata dengan baik sehingga belum banyak digunakan dan memberi manfaat bagi masyarakat khususnya anak-

anak. Untuk seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya rumpin yang di dalamnya ada sentra- sentra yang dapat dijadikan wadah mengekspresikan kegemaran dan minat anak pada seni dan budaya contohnya sentra audio visual dan sentra kriya. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya pada kluster ini sudah tersedia komplit dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar. Faktor komunikasi menjadi salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, salah satunya belum adanya peraturan kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak, hal tersebut belum dapat diwujudkan oleh kelurahan salah satunya menurut hasil pengamatan karena kurangnya pemahaman pegawai kelurahan Gayamsari tentang kelurahan ramah anak. Kurangnya pemahaman pegawai kelurahan Gayamsari mengenai kelurahan ramah anak disebabkan karena komunikasi yang kurang antara kelurahan/kecamatan kepada pihak Pemkot Semarang.. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila ada faktor komunikasi yang baik

antar aktor yang terlibat. Hal tersebut menunjukkan belum sesuai pelaksanaan pada kluster hak sipil dan kemerdekaan untuk anak.

Kluster Hak Pengasuhan Keluarga dan Alternatif

Dalam perwal indikatornya adalah terdapatnya anak dalam kartu kepala keluarga dan setiap keluarga mengalokasikan tabungan untuk anak tetapi dalam RAD yang menjadi fokus pelaksanaan program pada kluster ini adalah mengenai pernikahan dini. Karena yang penulis jadikan acuan adalah RAD maka apabila berdasar wawancara mengenai pernikahan dini, di kelurahan Gayamsari warga dan anak-anaknya memiliki kesadaran yang tinggi akan hal itu. Tetapi apabila ditelaah kembali jika hanya pernikahan dini yang dijadikan indikator dalam kluster ini hal ini tidak menunjukkan banyak kontribusi untuk menciptakan wilayah yang ramah anak.

Jadi kesimpulannya pada kluster ini tidak sesuai dengan indikator yang

standart, hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan atas regulasi dari lembaga ditingkat yang lebih tinggi dari Kelurahan dan Kecamatan, yaitu RAD kota Semarang yang memang hanya menuliskan fokus kegiatan pada kluster ini adalah mengenai pernikahan dini. Dalam kluster ini penulis menemukan bahwa pada kluster ini dilihat dari disposisi kader dan SKPD, penulis yakin mereka memiliki semangat yang tinggi dan komitmen yang membangun untuk senantiasa menjadikan wilayahnya sebagai wilayah yang ramah anak, jadi apapun arahan dari pusat pasti akan segera dilaksanakan, tetapi karena RAD yang dibuat oleh pihak Pemkot masih belum matang pada kluster ini, sehingga sesampainya di kelurahanpun aplikasinya pada kluster ini masih dirasa kurang terlihat. Tetapi sebaiknya pihak kelurahan lebih inovatif di dalam pembuatan kebijakan sendiri, dan jika penulis amati belum ada kebijakan atau peraturan yang dibuat sendiri oleh kelurahan untuk warganya yang berkaitan dengan hak-hak anak, komitmen dari pihak kantor kelurahan yang masih kurang

menunjukkan keseriusan dan inovasinya.

Kluster Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Melalui Perwal terdapat 25 indikator pada kluster ini, tetapi semuanya jika dirangkum mengerucut pada hal yang sama yaitu memberikan penjagaan, pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, baik anak tersebut masih di dalam kandungan sampai anak itu tumbuh, anak diharapkan mendapat hak yang baik dalam kesehatan dan kesejahteraan hidup. Dalam RAD kota Semarang yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program adalah menurunkan angka kematian bayi hal tersebut ditunjukkan dalam kelurahan Gayamsari melalui pendampingan pada ibu hamil, jadi selama kehamilan sampai melahirkan ibu tersebut akan di dampingi oleh kader dan pihak dari tenaga medis wilayah Gayamsari, hal tersebut sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, hal tersebut akan mengurangi resiko pada saat melahirkan baik untuk sang ibu maupun anak, indikator kedua adalah

penurunan gizi buruk, yang ditunjukkan kelurahan Gayamsari melalui sosialisasi dan Posyandu, indikator ketiga cakupan ASI Eksklusif ditunjukkan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan ibu hamil. Walaupun mengenai rumah sehat di RAD tidak dijadikan fokus pelaksanaan tetapi kelurahan Gayamsari melakukan pendataan dan sosialisasi mengenai rumah sehat, mengadakan kerja bakti dan jumat bersih untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Apabila dilihat dari struktur birorasi berdasarkan SOPnya, apa yang dikerjakan selalu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan pusat kota Semarang, terlihat dari apa yang ada dalam kelurahan tersebut semua berdasar pemikiran dari pusat. Jika dilihat dari fragmentasi dan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan sudah bagus, karena memang kebijakan ini terdiri dari banyak kluster, melibatkan banyak SKPD dan lembaga. Ketika kebijakan itu sampai ke kelurahan, pembagian tugas dan peran untuk melaksanakan program sudah terbagi menurut bidang keahlian masing-

masing. Dilihat dari prosedur pengawasan keuangan dan pelaksanaan program selalu dilaporkan kepada pihak yang lebih tinggi, apabila program dilaksanakan oleh pihak kelurahan maka dilaporkan kepada pihak kecamatan, apabila program dilaksanakan kader-kader, dilaporkan ke kelurahan terlebih dahulu. Semua laporan dilaporkan sebulan sekali, kemudian setahun sekali. Jadi kesimpulannya dilihat dari struktur birokrasinya, bukan suatu hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program. Daya tangkap dan tanggap warga kelurahan Gayamsari yang menjadikan kelurahan Gayamsari maju, terbukti dengan kejuaraan yang mereka ikuti dan banyak mendapatkan juara. Hal tersebut tentunya bisa terlaksana karena penyampaian informasi yang baik dan tepat sasaran yang telah dilakukan pihak Kelurahan. Untuk pelaporan informasi pelaksanaan program kepada pengawas atau mitra kerja rutin dilaporkan setiap sebulan sekali dan kemudian setahun sekali kepada pihak Kecamatan. Hal tersebut dilakukan pada tiap- tiap

seksi di kelurahan. Untuk daihatsu yang menjadikan kelurahan Gayamsari sebagai CSR perusahaan mereka, pihak dari mereka selalu mengawasi langsung dan menunggu laporan pelaksanaan program mengenai Posyandu dan PAUD kelurahan Gayamsari. Karena mereka memberikan banyak bantuan untuk sarana prasarana pada kluster pendidikan dan kesehatan. Jadi dilihat dari faktor komunikasi dan sumber daya pada kluster ini bukan menjadi penghambat implementasi

Kluster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Seni

Melalui Perwal dalam kluster ini terdapat 14 indikator penentu, yang jika dirangkum sama seperti dalam indikator RAD kota Semarang yang memfokuskan pada peningkatan akses pendidikan pada jenjang PAUD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, peningkatan akses dan partisipasi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan rendah, perwujudan sekolah ramah anak dan fasilitas keselamatan anak sekolah. Untuk

indikator peningkatan akses pendidikan pada jenjang PAUD, SMP/MTS, SMA/MA/SMK kelurahan Gayamsari mempermudah akses untuk masuk sekolah di wilayah lingkungannya sendiri, pendidikan dari jenjang PAUD sampai SMA/MA/SMK ada di wilayah kelurahan Gayamsari itu sendiri, dan untuk anak- anak yang tidak mampu bisa dengan mudah meminta surat keterangan tidak mampu di kantor kelurahan Gayamsari dengan membawa pengantar dari RT, RW terlebih dahulu. PAUD disanapun tiap bulannya dipungut biaya yang tidak mahal, dan gratis untuk yang tidak mampu, hal tersebut dilakukan pula oleh sekolah di jenjang berikutnya. Tetapi berdasar data dari Bapermas Kecamatan masih ada anak kelurahan Gayamsari yang tidak sekolah. Pada indikator kedua yaitu peningkatan akses dan partisipasi anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kelurahan Gayamsari dengan adanya sekolah kejar paket A di kelurahan Siwalan.

Untuk indikator yang ketiga yaitu perwujudan sekolah ramah anak dan fasilitas keselamatan anak sekolah ditunjukkan kelurahan Gayamsari dengan pembuatan sekolah- sekolah yang terletak pada jalur aman, adapun sekolah yang letaknya dipinggir jalan besar dibuat bangunannya terletak jauh dari jalan, agar anak- anak mudah dipantau apabila akan keluar sekolah, penjaga sekolahpun disediakan untuk selalu mengawasi dan memastikan anak- anak selamat jika akan menyeberang kesekolah saat berangkat maupun pulang sekolah. Sekolah- sekolah di buat aman dan nyaman untuk anak- anak.

Pada kelurahan Gayamsari masalah sumber daya masih banyak memiliki hambatan. Dilihat dari kuantitas dan kualitas sarana prasarana kelurahan memiliki sarana dan prasarana yang komplit tetapi tidak dirawat dan ditata dengan baik, seperti lahan bermain anak- anak yang tidak dirawat dengan baik, rumput yang sudah tinggi mengakibatkan taman tersebut tidak bisa digunakan seperti bagaimana mestinya, taman bermain

ada yang terletak dijalur yang tidak aman dan terlihat tidak ada pagar pembatas, sarana prasarana komputer yang sebetulnya banyak tetapi tidak tertata dengan baik, taman bacaan masyarakat yang tempatnya terlihat tidak nyaman bagi pembaca buku.

Tetapi jika ditelaah kembali hal – hal tersebut terjadi dikarenakan sumber dana yang tidak memadai untuk membuat pagar pembatas untuk taman bermain, dan belum ada dana yang cukup untuk membangun bangunan yang khusus untuk menempatkan buku- buku bacaan dan komputer. Dilihat dari kualitas dan kuantitas pelaksana program sebenarnya sudah cukup untuk kuantitas, tetapi untuk kualitas masih perlu ditingkatkan dilihat dari tenaga pendidik PAUD yang sesungguhnya bukan guru dan tidak memiliki ijazah guru, kemudian pegawai kelurahan yang belum banyak melakukan inovasi- inovasi dalam pembuatan program untuk anak- anak. Jadi kesimpulannya sumber dana yang tersedia dari pusat belum memadai untuk membangun sarana prasarana dan pelaksanaan program. Jadi

kesimpulannya faktor sumber daya menjadi penghambat pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis disposisi pelaksana program di kelurahan Gayamsari sudah baik masalah kejujuran dan intensitas pelaksanaan program sudah baik. Dilihat dari semangat para kader ibu-ibu rumpin maupun pengurus PAUD walaupun digaji seadanya, bahkan sering tidak mendapat upah mereka melakukan semua hal tersebut dengan semangat dan ikhlas. Jadi kesimpulannya pada kluster ini belum sesuai pelaksanaannya dan faktor sumber daya dan disposisi para pegawai kelurahan menjadi penghambat untuk pelaksanaannya.

Kluster perlindungan khusus

Melalui Perwal kota Semarang terdapat 9 indikator dalam kluster ini, yang jika dirangkum sama dalam indikator di RAD yaitu, menurunkan angka kekerasan pada anak, meningkatkan upaya- upaya pengadilan restorasi bagi anak bermasalah dengan hukum,

mengurangi anak yang bekerja dan pekerja anak, dan mengurangi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di kelurahan Gayamsari sendiri sudah ada pendamping untuk anak dan keluarga. Dan untuk anak-anak di kelurahan Gayamsari mereka bisa memastikan anak-anak disana terbebas dari anak jalanan dan pekerja anak. Karena setiap setahun sekali Bapermas kecamatan dan dibantu kelurahan serta para kader, mengadakan pendataan tentang status anak dan memastikan betul anak pada usia sekolah memang sekolah atau tidak.

Dilihat dari faktor komunikasi pihak kantor kelurahan Gayamsari pada kluster ini tidak begitu banyak memberi banyak informasi untuk para pendamping, karena pendamping lebih banyak berkomunikasi langsung dengan pihak Bapermas Kota ataupun Bapermas kecamatan dan langsung dengan masyarakat. Dilihat dari faktor disposisi, disposisi dari para pendamping dan juga Bapermas kecamatan Gayamsari sudah sangat baik, terbukti dengan keikhlasan

mereka mendampingi keluarga dan anak dengan gaji seadanya tetapi tetap giat berkomunikasi kepada teman-teman di Bapermas Kecamatan dan dengan sabar dan giat membantu keluarga dan anak yang memiliki masalah dengan cara memberikan pendampingan samapai ke meja hijau. Jadi kesimpulannya pada kluster ini faktor komunikasi dan disposisi bukan menjadi hambatan bagi pelaksanaan. Pelaksanaan program pada kluster ini juga sudah sesuai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kluster Hak Sipil dan Kemerdekaan

Pelaksanaan pada kluster ini belum sesuai, karena program di RAD yaitu kepemilikan akte kelahiran dan fasilitas informasi berbasis teknologi, seni dan budaya ada dan namun belum terlaksana dengan baik., karena fasilitas informasi berbasis teknologi belum sepenuhnya digunakan dan memberi manfaat bagi warga terutama anak-anak, dalam kluster ini indikator

dalam Perwal yaitu forum anak yang belum aktif dan berkontribusi hanya sekedar ada dan mengikuti berbagai pertemuan saja, serta belum adanya peraturan kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak.

Kluster Hak Pengasuhan Keluarga dan Alternatif

Pelaksanaan pada kluster ini belum sesuai. Indikator dalam RAD Kota Semarang, sudah dilaksanakan namun belum mencakup indikator yang ada pada Perwal Kota Semarang yaitu mengenai, setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak- anak. Diinilai indikator yang ada pada RAD untuk kluster ini belum memberi kontribusi yang cukup apabila hanya menyebutkan indikator pernikahan dini saja.

Kluster Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Pelaksanaan pada kluster ini sudah sesuai, karena program di RAD yaitu menurunkan angka kematian bayi, penurunan gizi buruk, cakupan ASI Eksklusif ada dan terlaksana dengan baik. Walaupun di RAD mengenai rumah sehat, kerja

bakti dan jumat bersih tidak dijadikan fokus program tetapi di kelurahan Gayamsari ada dan dilaksanakan dengan baik.

Kluster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni

Pelaksanaan pada kluster ini belum sesuai, karena program dalam RAD yaitu, peningkatan akses pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP/MTS, SMA/MS/SMK, peningkatan akses dan partisipasi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan rendah, perwujudan sekolah ramah anak dan fasilitas keselamatan anak sekolah ada dan tetapi belum terlaksana dengan baik, karena berdasar data yang dimiliki Bapermas Kecamatan masih ada anak yang tidak bersekolah pada usia 7- 15 tahun yaitu 18 anak

Kluster Perlindungan Khusus

Pelaksanaan pada kluster ini sudah sesuai, karena program dalam RAD yaitu, menurunkan angka kekerasan pada anak, meningkatkan upaya- upaya pengadilan restorasi

bagi anak bermasalah dengan hukum, mengurangi anak yang bekerja dan pekerja anak, dan mengurangi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial ada dan terlaksana dengan baik.

Faktor Pendorong

Struktur Birokrasi

Apa yang dikerjakan selalu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan pusat Kota Semarang, fragmentasi dan koordinasi antara kecamatan, kelurahan Gayamsari dan pusat Kota Semarang berjalan baik, pengawasan keuangan dan pelaksanaan program dilaporkan sesuai aturan dan tepat waktu

Disposisi Para Kader

Komitmen, intensitas dan kejujuran para kader khususnya Bapermas Kecamatan, pihak FKK kelurahan, ibu- ibu PKK, Pengurus Rumpin, Pengurus PAUD sudah baik, semua menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan giat.

Faktor Penghambat

Sumber Daya

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki Kelurahan Gayamsari tidak tertata dengan baik dan tidak terawat dengan baik, hal tersebut jika ditelaah kembali salah satunya karena kurangnya sumber dana yang disediakan, tidak adanya dana khusus pembiayaan untuk merawat sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pemenuhan hak anak. Sumber Daya manusia yang terdiri dari pegawai Kecamatan dan Kelurahan juga kurang memahami tentang adanya kelurahan ramah anak di lingkungannya.

Disposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Gayamsari

Komitmen, intensitas dan kejujuran pegawai Kecamatan dan kelurahan yang masih belum menunjukkan semangat, dilihat dari tidak adanya inovasi untuk membuat kebijakan atau peraturan yang bersangkutan dengan pemenuhan hak- hak anak, mereka hanya melaksanakan tugas yang diperintah dari pusat dan tidak ada pemahaman khusus mengenai pentingnya memenuhi hak- hak anak seiring lingkungan kecamatan dan kelurahan

Gayamsari yang dijadikan wilayah percontohan kelurahan ramah anak.

Komunikasi

Wawasan pihak Kecamatan dan Kelurahan mengenai kelurahan ramah anak yang masih sangat kurang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pertemuan rutin yang dilakukan pihak PemKot Semarang, sehingga sosialisasi mengenai kelurahan ramah anak kurang di dapatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan. Karena hanya program-program tertentu saja yang melewati perantara Kecamatan dan Kelurahan sebelum dilaksanakan, selebihnya pemberitahuan akan langsung disampaikan kepada bidang kader yang bersangkutan.

B. Saran

Bagi Pemerintah Kota Semarang :

1. BAPPEDA Kota Semarang lebih matang dalam merumuskan RAD di setiap kluster, dalam hal ini karena yang dijadikan tolok ukur pelaksanaan kegiatan kelurahan ramah anak adalah RAD Kota Semarang, lewat

rumusan dokumen RAD pihak kecamatan dan kelurahan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperintahkan.

2. Diharapkan BAPPERMAS mengadakan pertemuan rutin untuk penyampaian informasi, bertukar informasi, serta mengavaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dengan fokus pembicaraan tentang kota layak anak dan peraturan turunannya yaitu kelurahan ramah anak bersama seluruh gugus tugas Kota Layak Anak

Bagi pihak Kelurahan dan Kecamatan

1. Diharapkan dapat lebih mewujudkan komitmennya dengan lebih inovatif membuat kebijakan atau program-program dilingkungan untuk mendukung implementasi RAD demi menjadikan wilayahnya ramah anak.

2. Diharapkan dapat menghimpun masyarakat atau membentuk tim khusus untuk merawat sarana dan prasarana penunjang implementasi, yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah maupun mitra kerja.
3. Meningkatkan pemahaman tentang kelurahan ramah anak yang berada pada wilayahnya.
4. Diharapkan dapat mengaktifkan forum anak di kelurahan untuk selalu aktif mengikuti dan berkontribusi dalam setiap pertemuan.

Bagi masyarakat

1. Diharapkan berperan aktif dalam membantu keberhasilan implementasi, dan aktif dalam mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan lingkup hak-hak anak.
2. Diharapkan turut serta merawat dan menjaga sarana, prasarana yang telah diberikan atau disediakan

oleh pemerintah maupun mitra kerja implementasi.

3. Diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan mengenai kelurahan ramah anak agar mereka paham apa yang seharusnya mereka berikan dan dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono, Prof. Dr. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Computindo

Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/ 425 Tentang Penetapan Lokasi Program Kecamatan Percontohan Layak Anak di Kota Semarang Tahun 2011- 2015